



**PERJANJIAN KINERJA (PERUBAHAN)
PERWAKILAN BPKP ACEH**



**TAHUN
2021**

**NOMOR : S-1122/PW01/6/2021
TANGGAL: 31 MEI 2021**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN ACEH**

بادن فعاواسن كأواثن دان فمباثونن فرواكيلن أحيه

Jalan Tengku Panglima Nyak Makam Banda Aceh 23118
Telepon (0651) 28133, 28134, dan 28183, Faksimile (0651) 28173

PERJANJIAN KINERJA (PERUBAHAN) TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Khaira Jaya
Jabatan : Kepala Perwakilan BPKP Aceh

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Muhammad Yusuf Ateh
Jabatan : Kepala BPKP

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Banda Aceh, 31 Mei 2021

Pihak Pertama

Muhammad Yusuf Ateh
NIP 19640809 198503 1 001

Indra Khaira Jaya
NIP 19681231 199303 1 001

**PERJANJIAN KINERJA (PERUBAHAN) TAHUN 2021
PERWAKILAN BPKP ACEH**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			Satuan	Jumlah	
1		2	3	4	
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1	Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	144
		2	Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	239
		3	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	186.779
		4	Nilai penyelamatan keuangan Negara	Rupiah (Juta)	40.679
		5	Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	Rupiah (Juta)	118
		6	Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah	Rupiah (Juta)	59
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	1	Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target	Program Prioritas	3
		2	Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi	Kegiatan Prioritas	12
		3	Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target	Kegiatan Prioritas	12
		4	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	Proyek Strategis	1
		5	Jumlah Program Lintas Sektorial Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai	Program	3
		6	Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik	Persen	8,33
		7	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	80
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	1	Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	0
		2	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	0
		3	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	5
		4	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	2
		5	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	355

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
			Satuan	Jumlah
4 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	100
	2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	75
	3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	0
	4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Badan Usaha	0
5 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	1	Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	K/L/Pemda	11
	2	Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	K/L/Pemda	13
	3	Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level	Pemda	0
	4	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq	PemKab/K	2
	5	Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	0
	6	Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	Rekomendasi	1
	7	Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Desa	45,01
	8	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	130
	9	Jumlah APIP yang Mengimplementasikan	APIP	5
	10	Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	BUMN	1
	11	Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	BUMD	0
	12	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BULD	1
	13	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan	BUMD	0
	14	Jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan	BLUD	0
6 Meningkatkan Tata Kelola Unit Kerja	1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	76
	2	Persentase Pegawai yang mengikuti	Persen	100
	3	Persentase administrasi SDM yang	Persen	100
	4	Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu	Persen	100
	5	Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	87
	6	Persentase SPM yang terbit tepat waktu	Persen	91
	7	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan	Persen	100
	8	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus	Nilai	Baik
	9	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	81
	10	Maturitas SPIP Unit Kerja	Level 1-5	Level 3
	11	Indeks MR Unit Kerja	Level 1-5	Level 3
	12	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Indeks Skala 100	76

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		Satuan	Jumlah
	13 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks Skala 100	73

Kegiatan		Anggaran
1. Pengawasan Pembangunan di Perwakilan	Rp	5.596.416.000
2. Pelaksanaan Dukungan	Rp	23.032.813.000
	Rp	<u>28.629.229.000</u>

Kepala BPKP

Muhammad Yusuf Ateh
NIP 19640809 198503 1 001

Banda Aceh, 31 Mei 2021

Kepala Perwakilan



Indra Khaira Jaya
NIP 19681231 199303 1 001